




RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

 **0741-444015**

 **Dlhkota2017@gmail.com**

 **Dlh.jambikota.go.id**

**Jl. Jenderal Basuki Rahman
No. 8 Kota Baru**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kiranya Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah selanjutnya. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, untuk itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan dokumen ini.

Jambi, Agustus 2024

Kepala DLH Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah	34
BAB IV. PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran, perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja diawali dengan penyusunan rancangan Perubahan Renja dilanjutkan penyusunan Rancangan Akhir

Perubahan Renja dan akhirnya menjadi Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi; Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan tugas perbantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mengusung tema Pembangunan Kota Jambi pada tahun 2024 “Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang Handal serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, diharapkan bisa mewujudkan prioritas Pembangunan Kota Jambi yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata dan Investasi Daerah
- 5) Good Governance
- 6) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra). Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh dinas. Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah untuk menyesuaikan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- b. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH.
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kota Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja per triwulan dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) /Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja sampai dengan TW II		%	Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Jumlah Anggaran Rp	K	Jumlah Anggaran Rp	K	Jumlah Anggaran Rp		
	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Urusan Lingkungan Hidup								42,86	DLH Kota Jambi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	11.879.717.610	127,0	2.364.088.939	127	5.754.400.869	48,44	Sekretariat

		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	70,00	74.224.649	0	14.622.020	83,7	33.912.860	45,69	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	4.948.065	1	2.250.000	1	2.250.000	45,47	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2	54.057.385	1	7.960.000	1	21.170.090	39,16	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2	6.892.770	1	1.937.020	1	6.892.770	100,00	Sekretariat

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3.838.331	3	2.475.000	3	2.475.000	64,48	Sekretariat
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	4.488.098	4	-	8	1.125.000	25,07	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	9.498.284.526	100%	1.614.390.592	100%	4.349.009.925	45,79	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	8.823.160.765	69	1.496.395.592	69	4.081.119.925	46,25	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	660.048.000	3	113.345.000	3	260.990.000	39,54	Sekretariat

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	8.270.085	3	1.350.000	3	3.600.000	43,53	Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	6.805.676	0	3.300.000	0	3.300.000	48,49	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	40.800.000	100%	6.800.000	100%	17.000.000	41,67	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	40.800.000	5	6.800.000	5	17.000.000	41,67	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	61	273.550.000	0	33.367.735	0	198.460.435	72,55	Sekretariat

		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	164	136.530.000	0	-	0	128.205.000	93,90	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	137.020.000	2	33.367.735	2	70.255.435	51,27	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	546.304.408	100	203.176.602	100	333.827.668	61,11	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	16.874.220	1	6.300.000	1	11.075.000	65,63	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	37.390.188	1	18.428.350	1	27.992.230	74,87	Sekretariat
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	26.250.000	1	450.000	1	4.500.000	17,14	Sekretariat

		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	465.790.000	18	177.998.252	18	290.260.438	62,32	Sekretariat
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	291.225.787	0	273.200.000	0%	289.326.000	99,35	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan							0,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	291.225.787	7	273.200.000	7	289.326.000	99,35	Sekretariat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	819.535.101	25	168.115.500	25	403.071.101	49,18	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat							0,00	

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	408.600.000	0	86.045.800	0	172.497.302	42,22	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	137.993.901	1	26.764.300	1	95.165.300	68,96	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	272.941.200	4	55.305.400	4	135.408.499	49,61	Sekretariat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	335.793.139		50.416.490	0	129.792.880	38,65	Sekretariat

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	281.470.500	10	33.401.490	10	91.608.880	32,55	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	54.322.639	20	17.015.000	20	38.184.000	70,29	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							0,00	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	8.085.120	0	0	0	0	0,00	Bidang PPLH

		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	8.085.120	0	0	0	0	0,00	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	1	8.085.120		-	0	0	0,00	Bidang PPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1.537.463.726	0	135.321.574	0	828.603.243	53,89	Bidang PPLH
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.490.851.856	0	135.321.574	0	826.053.243	55,41	Bidang PPLH

		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	104.193.108		14.572.179	0	30.223.613	29,01	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	75.669.291		8.829.750		22.154.577	29,28	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	15	246.600.308		8.430.000		49.117.950	19,92	

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2	70.285.640		8.325.000		58.249.208	82,87	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	85.816.970		5.249.000	0	16.997.000	19,81	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	908.286.539	3	89.915.645	3	649.310.895	71,49	UPTD Laboratorium
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	4.935.120	0	0	0	0	0,00	Bidang PPLH

		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	4.935.120		-	0	0	0,00	Bidang PPLH
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,40%	41.676.750	0	0	0	2.550.000	6,12	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	300	41.676.750		-	0	2.550.000	6,12	Bidang PPLH

		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49,97	7.203.353.676	100%	1.338.467.100	1	3.136.935.026	43,55	Bidang Kehati
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,08%	7.203.353.676	100%	1.338.467.100	1	3.136.935.026	43,55	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	5.660.003.243		1.015.709.600	0	2.387.826.100	42,19	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	53	365.279.403		9.091.000	112	90.274.386	24,71	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	3	1.178.071.030	3	313.666.500	3	658.834.540	55,92	UPTD Hutan Kota

		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	62.022.212	2,50 %	7.204.375	0,025	13.666.975	22,04	Bidang PPLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	38.759.435	2,50 %	5.129.375	3%	11.291.975	29,13	Bidang PPLH
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17	28.713.260	0	3.980.000	0	8.954.000	31,18	Bidang PPLH

		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	10.046.175	3	1.149.375	3	2.337.975	23,27	Bidang PPLH
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	23.262.777	0	2.075.000	0	2.375.000	10,21	
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100	23.262.777	2	2.075.000	2	2.375.000	10,21	

		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	279.342.275	23,2 %	52.696.130	0,232	108.590.370	38,87	Bidang P2HL
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	30%	279.342.275	23,2 %	52.696.130	0,232	108.590.370	38,87	Bidang P2HL

		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	105.279.850	28	19.553.450	28	45.277.690	43,01	Bidang P2HL
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	160	127.062.425	35	33.142.680	35	59.312.680	46,68	Bidang P2HL

		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	9	47.000.000	0	-	0	4.000.000	8,51	Bidang P2HL
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	90.589.330	0	7.095.000	0	11.295.000	12,47	Bidang Kehati
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan/keompok masyarakat/ins titusi skala kabupaten/kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya	3	90.589.330	0	7.095.000	0	11.295.000	12,47	Bidang Kehati

		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	17.698.950		345.000	0	345.000	1,95	Bidang Kehati
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3	72.890.380		6.750.000	0	10.950.000	15,02	Bidang Kehati
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup							0,00	

		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							0,00	
		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							0,00	

		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	118.046.400	11%	20.978.015	0,113	46.998.015	39,81	Bidang P2HL
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	118.046.400	11,3 %	20.978.015	0,113	46.998.015	39,81	Bidang P2HL

		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	35	21.687.800	8	5.270.815	8	7.370.815	33,99	Bidang P2HL
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18	96.358.600	4	15.707.200	4	39.627.200	41,12	Bidang P2HL
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97,25 %	34.339.350.651	1	6.351.846.114	1	13.895.224.550	40,46	Bidang Pengelolaan Sampah

		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23,00 %	34.339.350.651	1	6.351.846.114	1	13.895.224.550	40,46	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	53.734.960	1	2.850.000	1	12.028.050	22,38	Bidang Pengelolaan Sampah

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	6.165.000		2.100.000	0	3.300.000	53,53	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	11661 3,84	25.211.952.674	0	4.534.535.655	0	10.276.535.285	40,76	Bidang Pengelolaan Sampah

		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	11416,94	890.762.454	0	145.467.850	0	341.765.200	38,37	Bidang Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	200000	8.176.735.563	0	1.666.892.609	0	3.261.596.015	39,89	Bidang Pengelolaan Sampah

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA), rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN TAHUN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP.
ORGANISASI : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup.

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Kota Jambi		55.517.971.000			56.132.591.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	11.879.717.610	Rasionalisasi/ Refocusing	BB	11.800.899.273
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		70	74.224.649	Rasionalisasi/ Refocusing	70	50.542.185
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2	4.948.065	Rasionalisasi/ Refocusing	2	3.598.065

	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD		2	54.057.385	Rasionalisasi/ Refocusing	2	36.837.385
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD		2	6.892.770	Rasionalisasi/ Refocusing	2	3.280.306
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3	3.838.331	Rasionalisasi/ Refocusing	3	3.538.331
	5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1	4.488.098	Rasionalisasi/ Refocusing	1	3.288.098

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		100%	9.498.284.526	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	9.387.413.226
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		81	8.823.160.765	penambahan	81	8.823.309.550
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12	660.048.000	Rasionalisasi/ Refocusing	12	551.898.000
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	8.270.085	Rasionalisasi/ Refocusing	12	7.500.000
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	6.805.676	Rasionalisasi/ Refocusing	3	4.705.676

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		100%	40.800.000		100%	40.800.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9	40.800.000		9	40.800.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah		70	273.550.000		61	258.480.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		164	136.530.000		164	136.530.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11	137.020.000	Rasionalisasi/ Refocusing	11	121.950.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	546.304.408	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	629.447.878

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	16.874.220	Rasionalisasi/ Refocusing	2	14.739.690
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	37.390.188	Rasionalisasi/ Refocusing	2	36.288.188
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	26.250.000	Rasionalisasi/ Refocusing	1	15.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	465.790.000	Penambahan	2	563.420.000
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	291.225.787		100%	292.169.287
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan						

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		11	291.225.787	Penambahan	11	292.169.287
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	819.535.101	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	816.571.931
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	408.600.000		1	408.600.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	137.993.901	Rasionalisasi/ Refocusing	5	135.030.731

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	272.941.200		4	272.941.200
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		100%	335.793.139	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	325.474.766
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	281.470.500	Rasionalisasi/ Refocusing	20	264.509.677
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50	54.322.639	Rasionalisasi/ Refocusing	50	60.965.089
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						

	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100%	8.085.120		100%	8.085.120
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD		100%	8.085.120		100%	8.085.120
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi		1	8.085.120		1	8.085.120
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7	1.537.463.726	Rasionalisasi/ Refocusing	7	1.439.505.815
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	1.490.851.856	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	1.410.405.815

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2	104.193.108	Rasionalisasi/ Refocusing	2	89.088.040
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		1	75.669.291	Rasionalisasi/ Refocusing	1	61.129.291
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)		15	246.600.308	Rasionalisasi/ Refocusing	15	84.504.000

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		2	70.285.640	Rasionalisasi/ Refocusing	2	70.068.080
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1	85.816.970	Rasionalisasi/ Refocusing	1	83.416.970
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		12	908.286.539	Penambahan	12	1.022.199.434
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	4.935.120		100%	0

	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2	4.935.120		2	0
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,40%	41.676.750	Rasionalisasi/ Refocusing	0,40%	29.100.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		300	41.676.750	Rasionalisasi/ Refocusing	300	29.100.000
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		49,97	7.203.353.676	Rasionalisasi/ Refocusing	49,97	7.094.360.822
	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi		0,08%	7.203.353.676	Rasionalisasi/ Refocusing	0,08%	7.094.360.822

	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971,18	5.660.003.243	Rasionalisasi/ Refocusing	971,18	5.571.803.243
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		53	365.279.403	Rasionalisasi/ Refocusing	53	352.048.259
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota		3	1.178.071.030	Rasionalisasi/ Refocusing	3	1.170.509.320
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	62.022.212	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	23.269.115
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100%	38.759.435	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	18.839.435

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		17	28.713.260	Rasionalisasi/ Refocusing	17	12.843.260
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		20	10.046.175	Rasionalisasi/ Refocusing	20	5.996.175
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan		100%	23.262.777	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	4.429.680
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina		100	23.262.777	Rasionalisasi/ Refocusing	100	4.429.680

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	279.342.275	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	247.002.275
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		30%	279.342.275	Rasionalisasi/ Refocusing	30%	247.002.275
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		150	105.279.850	Rasionalisasi/ Refocusing	150	88.509.850
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		160	127.062.425	Rasionalisasi/ Refocusing	160	111.492.425

	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		9	47.000.000		9	47.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	90.589.330		100%	89.689.330
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan/keompok masyarakat/institusi skala kabupaten/kota dan/atau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya		3	90.589.330		3	89.689.330
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2	17.698.950		2	17.698.950

	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		3	72.890.380	Rasionalisasi/ Refocusing	3	71.990.380
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup						
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						

	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam dan Lingkungan Hidup	Perindungan Pengelolaan	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	118.046.400	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	87.456.400
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	118.046.400	Rasionalisasi/ Refocusing	100%	87.456.400
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		35	21.687.800	Rasionalisasi/ Refocusing	35	16.587.800

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		18	96.358.600	Rasionalisasi/ Refocusing	18	70.868.600
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		97,25%	34.339.350.651	Rasionalisasi/ Refocusing	97,25%	35.342.322.850
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA		23,00%	34.339.350.651	Rasionalisasi/ Refocusing	23,00%	35.342.322.850
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2	53.734.960	Rasionalisasi/ Refocusing	2	23.274.960

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1	6.165.000	Rasionalisasi/ Refocusing	1	4.950.000
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		116613,84	25.211.952.674	Penambahan dari dana fiscal untuk pembelian container	116613,84	25.968.914.904
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		11416,94	890.762.454	Rasionalisasi/ Refocusing	11416,94	836.367.454

	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		200000	8.176.735.563	Penambahan dari dana fiscal untuk pembelian mesin pencacah	200000	8.508.815.532
--	--	---	--	--------	---------------	--	--------	---------------

BAB IV PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2024. Maka Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

Dengan demikian diharapkan pula agar program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2024 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Jambi, Agustus 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi**



Dr. H. ARDI, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700612 199803 1 004